

DAFTAR PUSTAKA

- A. Masyhur Effendi. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, bogor.
- Abdul Ghofur. 2009. *A, Filsafat Hukum*, ctk. Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Asas-Asas HAM : <http://desentralisasi-otonomi.blogspot.co.id/2012/04/konsepdasar-hak-asasi-manusia.html>, diakses tanggal 9 Januari 2023.
- Bassiouni, M.C. 2002. *Legal Control of International Terrorism: A Policy Oriented Assessment*. *Harvard International Law Journal* 83.
- Berita, Liputan Media, Foreign Terrorist Fighter dalam Pencegahan Kejahatan Terorisme di Indonesia, (diakses Kamis, 5 Agustus 2021 pada website <https://fisip.ui.ac.id/foreign-terrorist-fighter-dalam-pencegahan-kejahatan-terorisme-di-indonesia/>)
- Bjelopera, J.P. 2014. *Countering Violent Extremism in the United States Congressional Reserach Service*.
- Corwin, E.S. dan J.W. 1967. *Peltason, Understanding the Constitution, fourt edition*. New York, Holt, Rinehart and Winston.
- Crenshaw, M. 2002 *Teror di Bali, Oleh Godlif, Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi di Catholic University of America Washington DC*, (Kompas, Rabu, 16 Oktober 2002).
- Desi Anwar, 2001, kamus lengkap bahasa indonesia, surabaya: karya abditama.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 2004. *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia.
- Gautama, Sudargo, 1987, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni.
- Hadjon, P. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Cetakan 1, Surabaya: Peradaban.
- Hakikat HAM: <http://ensiklopediasli.blogspot.co.id/2015/09/hakikat-hak-asasimanusia-ham-lengkap.html>, diakses tanggal 9 Januari 2023.
- Hakim, L. 2019. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

Hakim, L. 2020. *Penerapan dan Tujuan Implementasi "Tujuan Pemidanaan"*, Yogyakarta: Deepublish. Hallet, Nuning, 2008, *Perempuan Dan Kewarganegaraan, Perempuan Dan Hukum : Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Hastuti, N. Eksistensi Sistem Juri dalam Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat, (diakses pada 13 Juni 2013, oleh website <https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/eksistensi-sistem-juri-dalam-sistem-peradilan-pidana-amerika-serikat>)

<http://www.state.gov/s/seci/index.htm>

<http://www.theglobegwu.com/staff-blog/terrorism-in-southeast-asia-jemaahislamiyah/>

Hutabarat Ramli, 2007, *Sekitar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Penerbit: Kencana Bakti, Bandung.

I.R. Poedjawijatna, 1997, *Pembimbing Ke Arah Filsafat*, Jakarta: Rineka Cipta.

Ibrahim, J. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2016. Edisi Kelima, Jakarta: Balai Pustaka.

Kansil, C.S.T.. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Kaplan, J. 1973. *Criminal Justice*, The Foundation Press Inc., New York: Mineola.

Kleden, N. 2008. Ritus Ruwat: Esensialisme Baru dalam Politik Kebudayaan Indonesia. *Jurnal Masyarakat dan Budaya* Vol.10 No.1. Jakarta: PBM-LIPI.

Mac Iver, R.M. 1950. *The Modern State, reprinted*. London: Oxford University Press.

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.

Marzuki, P.M. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

Miriam Budiarjo, 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Muladi. 2003. *Undang-undang Terorisme Sebagai Perlindungan terhadap HAM dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Terorisme*.

- Mulyana. 1994 *Mengenal Hukum dan Pengadilan Amerika Serikat*, Era Hukum, No. 2/Th.1.
- Muttaqim. 2020. Foreign Terrorists Fighters (FTF) Dan Langkah Administrasi Negara Terhadap Keadaan Tanpa Kewarganegaraan. *Indonesian State Law Review*, Vol. 2 No. 2.
- Mys, Hambali Bisa Kehilangan Status WNI, diakses pada 25 Agustus 2003, oleh website <https://www.hukumonline.com/berita/a/hambali-bisa-kehilangan-status-wni-hol8678?page=all>.
- Pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia: <http://rinnyagustina.blogspot.co.id/2011/02/pengertian-hak-asasi-manusia-secara.html>, diakses tanggal 9 Januari 2023.
- Pide,. 1999. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Rahayu, 2012, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rhona K.M. Smith, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Robertson, G. 2002. *Kejahatan Terhadap Manusia-Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*, (Ed. Suhartono), (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia).
- Romany, R.S. 2007. *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan-Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sasongko, W. 2007. *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar lampung: Universitas lampung.
- Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sukandarrumidi. 2012. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sulaiman, K.F. 2007. *Who is The Reall Terrorist, Menguak Mitos Kejahatan Terorisme*, Yogyakarta: Elmatara Publishing.
- Sunardi., A. Wahid., & F. Tanuwijaya. 2017. *Terorisme Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana Internasional*, Cetakan Pertama. Tangerang selatan: Nirmana MEDIA.

The data do reflect that the estimate for the United Kingdom was updated for the version of ICSR's (dataset published in the 2015 Munich Security Report, released January 2015).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 angka 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 2.

Usman, H. dan Akbar, S.P. 2009. Metodologi penelitian sosial. Jakarta: Bumi aksara.

UU RI No 12 Thn 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Bab IV Kehilangan Kewarganegaraan, Pasal 23.

Weissbrodt, D. and Collins, C. 2006. *The Human Rights of Stateless Persons*. University of Minnesota Law School.

Wijayanti, Asri. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Winarno. 2007. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Y. Fitriliani. 2013. Yurisdiksi Negara Dalam Kejahatan Terorisme. *ADIL : Jurnal Hukum*. Vol. 4 No.1.

Yunanto, S. 2017. *Ancaman Dan Strategi Penanggulangan Terorisme di Dunia dan Indonesia*. Jakarta: IPSS & MIM.